

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah sehingga membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Selain itu, di era globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing pada setiap pemerintah daerahnya. Daya saing pada pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat tercapai melalui otonomi daerah dengan peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih. Sehingga, dengan adanya otonomi daerah pengelolaan keuangan berada pada pemerintah daerah. Menghadapi kondisi yang demikian pemerintah melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Apabila pengelolaan keuangan daerah tersebut berhasil maka hal itu Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintahan (SAP) . SIA merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan.

Pada tahun 2010, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) telah selesai disusun oleh Komite Sistem Informasi Akuntansi (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus mengikuti SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan tujuan agar lebih *accountable* dan kualitas laporan keuangan tersebut semakin berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Azlim et al, 2012).

Laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun komponen yang disampaikan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem

Informasi Akuntansi dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Sistem merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan, disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh (terintegrasikan) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.

Pengertian sistem menurut Widjanto (2009:2) yang mengartikan bahwa sistem merupakan sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung didalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisiensian, dan ketidakefektifan (Sukmaningrum, 2009).

Reformasi Keuangan Negara tahun 2003 tersebut, telah menuntut profesionalitas pengelolaan keuangan negara, yang akan mengingatkan adanya suatu keharusan bahwa laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (I Gde, 2005).

Hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan dalam tiga buku, buku pertama mengenai opini, buku kedua mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan buku ketiga kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, menunjukkan saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan atas LKPD belum sebagaimana yang diharapkan, hal ini terlihat dari opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI masih ada yang mendapatkan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat (TMP). Perkembangan Opini LKPD pada Kabupaten di Jawa Barat pada Tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel 3. Pada tahun 2010, menunjukkan fenomena laporan keuangan pemerintah daerah semuanya masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Salah satu fenomena yang terjadi berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan adalah keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Dikutip dari www.pikiran-rakyat.com, 9 April, 2015-02:50 menyampaikan laporan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dari 542 pemerintah daerah (Pemda) yang baru diterima laporannya pada Semester II 2014, baru 68 Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD).

Padahal berdasarkan pasal 56 ayat 3 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan harus sudah disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau paling lambat pada akhir Maret.

Penegasan itu disampaikan Harry Azhar Azis dalam sambutannya pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 kepada DPD RI di Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Harry mengatakan bahwa atas masih adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut, BPK akan terus mendorong kepada pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan laporan keuangan tersebut secara tepat waktu, berdasarkan catatan BPK jumlah Pemda sampai dengan Semester II Tahun 2014 adalah 542, namun yang telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2013 hanya 524 pemerintah daerah. Total asset 524 LKPD pada akhir Tahun 2013 senilai Rp 2.006,6 triliun, total kewajiban senilai Rp 21,4 triliun dan total ekuitas senilai Rp 1.990,75 triliun. Sedangkan total pendapatan dan belanja selama 2013 adalah senilai Rp 726,56 triliun, dan senilai Rp 709,77 triliun.

Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. (Kurniawan, 2011). Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan guna membantu

manajemen dalam pembuatan keputusan. Setiap manajemen dalam sebuah organisasi memerlukan informasi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya. Semakin rendah tingkat manajemen memerlukan informasi yang rinci mengenai operasi dan kegiatan yang akan dilakukan, semakin tinggi tingkat manajemen membutuhkan informasi yang lebih ringkas.

Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Bagian akuntansi dituntut untuk dapat menghasilkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Apabila semua faktor telah dipertimbangkan maka manajemen mempunyai risiko yang lebih kecil dalam membuat kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Menurut Machfudz (2000) semua faktor penting untuk mendukung manajemen mengambil keputusan yang tepat adalah dengan memanfaatkan informasi akuntansi yang tersedia dan disajikan dengan baik.

Sebagai sebuah lembaga yang berorientasi kepada publik atau masyarakat, pemerintah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang mengandung transparansi dan akuntabilitas. Fenomena lain juga ditemukan pada akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah. Dikutip dari www.inilah.com 15/10/2015 16:00 diketahui bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, mendorong pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Daerah yang laporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) alias bisa dipertanggungjawabkan masih rendah. BPK telah melakukan pemeriksaan atas 504 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

atau sudah 93,51 persen diproses pada Semester I tahun 2015. Pada 2015, sebanyak 539 pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan.

Fenomena yang menggambarkan kelemahan SPI berkaitan dengan kualitas laporan keuangan di pemda, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2016 ditemukan sebanyak 425 kasus kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan, diantaranya disebabkan oleh pencatatan tidak/ belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan tidak sesuai ketentuan; entitas terlambat menyerahkan laporan; sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pelaporan belum didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Tabel lengkap mengenai kelemahan sistem informasi akuntansi dapat dilihat pada tabel 1 menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansi masih belum optimal pelaksanaannya.

Tabel 1.1

Rekapitulasi hasil temuan BPK RI
Berkaitan dengan kelemahan Sistem Akuntansi dan Kelemahan Laporan

No	Kelompok	Jumlah Permasalahan	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	425	40,63
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	154	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	152	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	104	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	13	
5	Entitas terlambat menyampaikan laporan	2	
6	Lain-lain	0	

Sumber: IHPS BPK RI semester I Tahun TA 2016

Menurut Solikin (2011), berbagai upaya telah dilakukan pemda untuk meningkatkan kualitas LKPD, seperti yang dilakukan oleh pemda provinsi (pemprov) Jawa Barat dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang andal, pemprov telah melakukan penertiban aset, terutama eksistensi aset, hak kepemilikan aset, kelengkapan, penilaian dan pengungkapan aset.

Upaya ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi teknologi informasi siklus barang daerah, dan diimplementasikan juga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya penyajian laporan keuangan yang andal dan kecepatan dalam penyajiannya (tepat waktu) .

Pemanfaatan laporan keuangan dilakukan pada saat penyampaian pertanggungjawaban APBD kepada legislatif sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan setahun sekali. Pemanfaatan laporan keuangan sebagai bahan untuk diperiksa oleh BPK RI, hasilnya pada bulan Juni tahun berikutnya. Penyajian laporan keuangan yang belum *realtime* (masih bersifat tahunan/output diakhir tahun) dan bersifat angka-angka historis, mengakibatkan laporan keuangan belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan manajemen pemerintahan sehari-hari. Laporan keuangan (terutama yang WTP) belum digunakan sebagai persyaratan dalam pengambilan kebijakan menyangkut alokasi pendanaan ke daerah.

Tujuan laporan sektor publik lebih rumit dibandingkan sektor swasta, karena menyangkut aspek ekonomi, serta aspek sosial dan politik dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan cenderung hanya bisa menyajikan aspek ekonomi (melalui jenis belanja berdasarkan klasifikasi

ekonomi) sedangkan aspek sosial dan politik tentunya sulit untuk disajikan dalam laporan keuangan. Sulit untuk menilai atau mengukur dari laporan keuangan apakah sektor publik telah memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada rakyatnya.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD kabupaten di Jawa Barat menggambarkan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah masih lemahnya penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik.

Fenomena lain sebagai faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. (Kurniawan, 2011). Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Setiap manajemen dalam sebuah organisasi memerlukan informasi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya. Semakin rendah tingkat manajemen memerlukan informasi yang rinci mengenai operasi dan kegiatan yang akan dilakukan, semakin tinggi tingkat manajemen membutuhkan informasi yang lebih ringkas.

Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Bagian akuntansi dituntut untuk dapat menghasilkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Apabila semua faktor telah dipertimbangkan maka manajemen mempunyai risiko yang lebih kecil dalam membuat kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Menurut Machfudz (2000) semua faktor penting untuk mendukung manajemen mengambil keputusan yang tepat adalah dengan memanfaatkan informasi akuntansi yang tersedia dan disajikan dengan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. kualitas informasi laporan keuangan diteliti oleh Tantriani Sukmaningrum (2012).
2. Sistem pengendalian intern diteliti oleh AS Syifa Nurlillah (2014).
3. Nilai informasi diteliti oleh Dita Afrianti (2011).
4. Ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan Wahyu Adhi Noor (2010) ; Raya Putri (2013); Netty Herawati(2008).
5. Opini auditor diteliti oleh Vanian Yamadita (2014)
6. Teknologi Informasi diteliti oleh Indah Fatmawati (2015)
7. Formalisasi pengembangan SIA yang diteliti oleh Kadek Rilly dkk (2015)

Agar lebih jelas melihat faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

No	Nama	Tahun	Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah						
			kualitas informasi laporan keuangan	Sistem pengendalian Intern	nilai informasi	Ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan	Opini auditor	Teknologi Informasi	Formalisasi pengembangan SIA
1	Netty Herawati	2008	✓	-	✓	✓	-	✓	-
2	Wahyu Adhi Noor	2010	✓	-	-	✓	X	-	✓
3	Dita Afrianti	2011	✓	-	✓	-	-	-	-
4	Tantriani Sukmaningrum	2012	✓	-	✓	-	-	✓	-
5	Raya Putri Ashari	2013	✓	✓	-	-	-	-	-
6	AS Syifa Nurlillah	2014	-	✓	-	✓	✓	-	-
7	Vanian Yamadita	2015	-	-	X	X	✓	-	✓
8	Indah fatmawati	2015	✓	-	✓	-	-	✓	-
9	Kadek Rilly dkk	2015	✓	✓	-	-	-	-	✓

Keterangan:

- ✓ = Berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
- X = Tidak berpengaruh kualitas laporan keuangan
- = Tidak diteliti

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini penulis akan meneliti variabel Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan. Karena menurut penelitian terdahulu membuktikan bahwa variabel-variabel tersebut belum konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Dewi Agustina (2010) dengan judul “pengaruh sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan di PT.KAI, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif antara sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah terletak pada objek dan variabel independen yang digunakan. Objek yang dipakai Agustina adalah pada BUMN. Sedangkan variabel independen yang berbeda adalah penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi. Adapun alasan peneliti mengganti variabel independen menjadi pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah karena peneliti lebih melihat pada aktivitas pelaksanaan aplikasi sistem informasi keuangan dalam proses pengelolaan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Adapun pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ridwan (2009) dengan judul “pengaruh penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian rujukan adalah terletak pada variabel independen yang digunakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Cianjur. (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur).**

1.2 Identifikasi Masalah/ Rumusan Masalah.

1.2.1 Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di pemerintahan Kabupaten Cianjur.
2. Kualitas penyusunan laporan keuangan daerah di pemerintahan Kabupaten Cianjur.
3. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Cianjur

1.2.2 Rumusan Masalah.

Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, dan penyimpangan antara teori dengan praktik (Sugiyono, 2005). Penerapan sistem informasi pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sektor publik akan berpengaruh terhadap laporan keuangan daerah dalam organisasi tersebut. Laporan keuangan daerah dalam suatu organisasi setelah

penerapan sistem informasi akan mengalami perubahan jika dibandingkan dengan laporan keuangan daerah sebelum penerapan sistem informasi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di pemerintahan Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan daerah di pemerintahan Kabupaten Cianjur?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Cianjur?

1.3 Tujuan Penelitian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk membantu pencapaian tujuan penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di pemerintahan Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan daerah di pemerintahan Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Cianjur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Cianjur.
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literatur-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada di organisasi pemerintahan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan serta memberikan gambaran tentang aplikasi ilmu teori yang penulis peroleh dibangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya tentang seberapa besar implementasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan .

2. Bagi Instansi

Dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan terutama pada aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi akuntansi.

3. Bagi Pihak Lain

Memperoleh masukan yang diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi penelitian sejenis.